



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KATARINA ISWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **783110**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.639.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 968 m²/100 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m²/210 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 604 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 453.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 696 m²/500 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.436.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1135 m²/500 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
6. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 1140 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 157.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, SUZUKI FORSA Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, SUZUKI APV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOBIL, TOYOTA CROWN Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	559.044.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.370.544.000
III. HUTANG	Rp.	2.853.660.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.516.884.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.